KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA DASAR PENJUALAN KAYU HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM RANGKA PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN RAKYAT

(Policy for Enhancing Community Forest Plantations by Setting Floor Price on Selling of Their Wood Productions)

Oleh/*By* :
Setiasih Irawanti, Retno Maryani, Rahman Effendi, Ismatul Hakim & Hariyatno Dwiprabowo[1]

ABSTRACT

The policy needs to be enhanced by setting up afloor price of wood produced by forest farmers. That floor price could be assesed by retrieving actual practices of wood trading at selected areas. This article is written based on the data obtained from Jambi and Riau provinces. It aims to assess the floor prices of wood produced by forest farmers at the two locations and it discusses various factors influencing the price. Three different prices of wood that include market price, standing stock price and social or parity price- are used to approach the price. The calculation shows prices of wood in the two provinces differ, and the wood in Jambi is priced higher than that of neighbouring province. Beside akasia wood, rubber wood is also traded by forest farmers in Jambi. At farmer's gate in Jambi, the price for rubber wood is traded at Rp 220.000 - Rp 250.000/ m^3, and the price of akasia wood in Riau is Rp 132.000 - Rp 148.000/ton. The standing stock price for akasia wood in Jambi is Rp 208.073,84 -Rp 226.471,10/ ton and Rp. 106.218,76 - Rp 118.580,91/r ton in Riau. The social price in Jambi is Rp 245.000 s/d 270.000, and Rp 150.500 per m^3 in Riau. Several factors influence the price, and they include types of wood, cutting period and its utilization. Moreover, price of wood will infulence income of forest farmers beside quantity of production and the distance from forest plantation to its processing industry. The article concludes that divergency exist between the market or actual price from the social or efficient of parity price. That reflects policy distortion at the wood market and results into market failure or in efficient market. The distortion may come from practices of monopsony, negative or positive externalities and asymmetric market internal the country. That suggests the need to set up floor price for woods produced by Community Forest Plantaions in order to benefit forest farmers.

Keywords: Community forest plantation, floor price for timber,, policy analysis matrix

ABSTRAK

Harga dasar penjualan kayu hutan tanaman rakyat (HTR) perlu ditetapkan oleh menteri kehutanan untuk melindungi hak petani kayu HTR. Penetapan harga dasar tersebut perlu dikaji melalui penelusuran praktek penjualan kayu HTR yang dilakukan di lapangan. Tulisan ini dimaksudkan untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan penetapan harga dasar penjualan kayu HTR dengan mengambil lokasi penelitian di Jambi dan Riau. Dengan menerapkan metode

[1] Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, Jalan Gunung Batu No. 5, Bogor.

Policy Analysis Matrix (PAM), penetapan harga dasar didekati dengan menghitung harga pasar, harga tunggak atau tegakan dan harga sosial atau paritas. Hasil kajian menunjukkan bahwa jenis kayu, peruntukan kayu serta daur tanaman mempengaruhi harga dasar penjualan kayu. Sedangkan harga penjualan, jumlah produksi dan jarak lahan tanam ke pabrik serta faktor produksi mempengaruhi penghasilan petani. Di Jambi, selain jenis kayu *acacia mangium* petani HTR juga menjual kayu karet. Sedangkan di Riau, petani HTR hanya menjual kayu *acacia mangium*. Harga kayu di kedua lokasi kajian berbeda, dimana harga di Jambi lebih tinggi dari pada harga di Riau. Kayu karet rakyat di Jambi dijual di tingkat petani dengan harga Rp 220.000 s/d Rp 250.000 per m^3, sedangkan di Riau Rp 132.000 s/d Rp 148.000/ton. Harga tunggak kayu *Acacia mangium* di Propinsi Jambi sekitar Rp 208.073,84 s/d 226.471,10 per ton. Harga tunggak kayu *Acacia mangium* di Propinsi Riau sekitar Rp 106.218,76 s/d Rp 118.580,91 per ton. Harga sosial di Jambi 245.000 s/d 270.000, sedangkan di Riau 150.500 per m^3. Tampak bahwa harga pasar/aktual berbeda dari harga sosial/efisiensi, artinya ada divergensi. Hal ini diakibatkan oleh adanya kegagalan pasar atau distorsi kebijakan. Pasar dikatakan gagal bila tidak mampu menciptakan harga kompetitif yang mencerminkan *social opportunity cost* atau alokasi sumberdaya/produk yang efisien. Penyebab kegagalan pasar adalah (1) monopoli atau monopsoni, (2) *negative externalities* atau *positive externalities*, (3) pasar faktor domestik yang tidak sempurna.

Kata kunci: Hutan tanaman rakyat, harga kayu, matrik analisis kebijakan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Presiden RI telah mencanangkan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan pada tanggal 11 Juli 2005. Terdapat tiga agenda pokok revitalisasi kehutanan, yaitu: meningkatkan pertumbuhan sektor kehutanan, menggerakkan sektor riil kehutanan/ industri kehutanan untuk penyerapan tenaga kerja, dan memberdayakan ekonomi masyarakat setempat untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan.

Sejalan dengan program revitalisasi kehutanan di atas dan dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan, sejak tahun 2007 Departemen Kehutanan merencanakan pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR). Program HTR dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan, disamping tentunya untuk merehabilitasi hutan yang terdegradasi. Pembangunan HTR akan dapat menuai keberhasilan apabila ditunjang oleh keberpihakan Pemerintah kepada petani HTR.

Kebijakan Pemerintah untuk mendorong keberhasilan program HTR pun telah dikeluarkan, antara lain PP Nomor 6 Tahun 2007 jo. PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Usaha dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Sesuai dengan pasal 41 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2007 tersebut, Menteri Kehutanan diamanatkan untuk **menetapkan harga dasar penjualan kayu HTR** untuk melindungi hak-hak petani HTR. Hal ini merupakan wujud dari keberpihakan Pemerintah kepada petani HTR dalam menyiasati empat hal utama sebagai berikut.

1. Kondisi pasar

Di luar Pulau Jawa, kondisi pasar kayu jenis *Akasia* yang sebagian besar untuk konsumsi pabrik pulp dan kertas umumnya mempunyai *buyer* yang sedikit/terbatas (Industri Pulp dan Kertas) dan jumlah *supplier* yang banyak (Perusahaan HPHTI baik yang satu grup atau sendiri, HTR, HR). Kondisi demikian bersifat ***oligopsoni*** dimana posisi tawar kayu HPHTI/HTR/HR akan relatif rendah dan harga akan ditentukan oleh *buyer*. Apalagi *buyer* mempunyai pasokan bahan baku tetap dari HPHTI dalam satu *holding company*. Selain itu, pemasaran kayu rakyat juga menghadapi barier berupa sistem Tata Usaha Kayu (TUK), sehingga petani kayu tidak dapat menjualnya secara bebas. Dalam kondisi pasar demikian kiranya perlu adanya intervensi dari Pemerintah berupa keberpihakan kepada petani HTR.

Sedangkan di Pulau Jawa, kayu yang dihasilkan oleh petani HTR sebagian besar berjenis sengon dan dimanfaatkan untuk kayu pertukangan. Oleh karena baik *buyer* maupun *suplier* kayu jumlahnya banyak, maka kondisi pasar bersifat pasar bebas dengan persaingan. Harga akan ditentukan atau tergantung dari stok kayu di pasar. Posisi tawar dari petani HTR/HR di Jawa relatif lebih baik dibandingkan petani HTR/HR di luar Jawa. Dalam kondisi pasar demikian, maka campur tangan Pemerintah dapat diminimalisir.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga dasar penjualan kayu

Ada tiga hal yang mempengaruhi harga penjualan kayu. ***Pertama***, harga tersebut tergantung dari jenis kayunya, misalnya jenis akasia (*Acacia mangium*), sengon (*Albizia falcataria*), kayu karet, kayu manis dan sebagainya. ***Kedua***, harga kayu juga tergantung dari peruntukan kayu tersebut, misalnya untuk kayu pertukangan atau kayu pulp. Sebagai contoh sama-sama kayu akasia, jika dijual untuk kayu pertukangan biasanya lebih mahal daripada kayu untuk pulp. Hal tersebut karena kayu untuk pertukangan umur tebangnya lebih panjang daripada kayu untuk pulp, atau berasal dari tegakan yang sama namun kualita kayu pertukangan lebih tinggi daripada kayu pulp. ***Ketiga***, daur tanaman yang berbeda akan menghasilkan kubikasi dan kualitas kayu yang berbeda pula karena dipengaruhi oleh riap tahunannya.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghasilan petani HTR

Penghasilan petani HTR pada prinsipnya dipengaruhi oleh biaya produksi dan harga penjualan kayu. Biaya produksi yang tetap dengan harga penjualan kayu yang semakin tinggi akan memperbaiki penghasilan petani HTR.

Produksi kayu HTR ditandai dengan banyaknya panenan kayu (m^3) per hektar. Produksi kayu sengon dari petani HTR di Jawa rata-rata mencapai 348 m^3/ha, sedangkan produksi kayu akasia di luar Jawa rata-rata sekitar 150 m^3/ha. Semakin tinggi produksi kayu HTR, semakin baik penghasilan petani tersebut.

Kedekatan lahan dengan lokasi pasar atau pabrik mempengaruhi penghasilan petani HTR. Lokasi lahan HTR semakin dekat dengan pasar atau pabrik akan memperpendek jarak transportasi. Demikian halnya dengan aksesibilitas yang baik dan lancar untuk menjangkau pasar atau pabrik. Apabila harga kayu di pabrik tetap, maka

semakin dekat jarak dan semakin baik kondisi transportasi akan mengurangi biaya transportasi. Dengan demikian semakin besar uang yang diterima petani HTR.

Mutu, harga dan ketersediaan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan dalam usaha HTR seperti bibit tanaman, pupuk, kesuburan lahan, dan lain-lain akan mempengaruhi pendapatan petani HTR. Bibit yang berkualitas dan pupuk yang selalu tersedia dipasar dengan harga lebih murah, serta lahan yang subur, akan meningkatkan pendapatan petani HTR.

4. Keberpihakan pemerintah kepada petani HTR

Pembangunan HTR akan berhasil apabila menguntungkan petani. Tanpa adanya intervensi dari Pemerintah jika menanam pohon untuk HTR tersebut memberikan penghasilan yang layak atau sesuai kriteria kelayakan usaha dan untung bagi petani, maka pembangunan HTR akan menuai keberhasilan.

Apabila dirasakan kurangnya antusias masyarakat untuk berpartisipasi dalam program HTR ini karena kurang menguntungkan atau tidak jelas untung/ruginya, maka perlu adanya keberpihakan dari Pemerintah. Keberpihakan Pemerintah kepada petani HTR dapat berupa kebijakan apa saja yang menguntungkan atau memberi insentif bagi petani HTR. Keberpihakan Pemerintah dapat berupa: penerapan prosedur (skim) pembangunan HTR yang sederhana, pemberian kredit lunak pembangunan HTR, penetapan harga dasar penjualan kayu yang pro petani, pembangunan pabrik yang dekat dengan pusat-pusat bahan baku dan sebagainya.

Khusus untuk penetapan harga dasar penjualan kayu HTR, maka perlu adanya kajian yang komprehensif tentang nilai komponen biaya per segmen kegiatan dari mulai penanaman sampai penjualan (*value chain*). Dari kajian tersebut akan terlihat seberapa nilai keuntungan/kerugian yang akan diperoleh per aktifitas: petani, pedagang, pengangkut (transportasi), industri dan sebagainya. Walaupun hal ini dilaksanakan oleh pihak pebisnis, namun seharusnya ada unsur keadilan dalam arti semua pihak yang terlibat akan memperoleh keuntungan/harga yang wajar.

Apabila ditetapkan harga dasar penjualan kayu, maka perlu intervensi lebih lanjut dari Pemerintah, antara lain (1) buka/tutup ekspor kayu apabila stok berlebih, maka kran untuk ekspor dibuka, demikian pula sebaliknya. (2) pemberlakuan PNBP yang Tinggi/Rendah, apabila nilai keuntungan petani berlebih, maka PNBP (berupa PSDH) dapat dinaikkan, demikian pula sebaliknya dan (3) Pembentukan badan penyangga kayu (semacam BULOG), perlu ada kajian yang komprehensif tentang ini.

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji penetapan harga dasar penjualan kayu HTR agar diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang hal-hal yang terkait dengan penetapan harga dasar dimaksud.

B. Tujuan

Tulisan ini ditujukan untuk mengkaji penetapan harga dasar penjualan kayu HTR agar diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang hal-hal yang terkait dengan penetapan harga dasar dimaksud.

II. METODOLOGI

A. Penghitungan Harga

Untuk menetapkan harga dasar penjualan kayu HTR dapat digunakan tiga pendekatan penghitungan harga, yaitu (1) harga pasar, (2) harga tunggak/tegakan, (3) harga sosial/paritas.

1. Harga pasar

Harga pasar merupakan harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar, yaitu proses tarik-menarik antara para konsumen dan para produsen yang bertemu di pasar kayu HTR. Data harga pasar kayu HTR di tingkat petani dapat diperoleh dari petani HTR, pedagang tingkat desa, atau indutri yang langsung membeli ke petani.

2. Harga tunggak

Tingkat harga yang mencerminkan nilai tegakan disebut harga atau nilai tunggak. Petani HTR tentu berkeinginan menutup semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi kayu serta memperoleh keuntungan dari usahanya. Biaya yang dikeluarkan pada pembangunan HTR adalah biaya penanaman (penyiapan lahan + bibit + ajir + tenaga kerja + angkutan bibit + lain-lain) dan biaya tahunan (penyiangan + pupuk + tenaga kerja + PBB+ biaya operasioanal lainnya). Biaya penanaman dikeluarkan pada tahun ke 0, sedangkan biaya tahunan dikeluarkan mulai tahun ke-1 sampai akhir daur. Sementara itu volume produksi kayu HTR per hektar merupakan hasil perkalian daur tanaman dan riap per hektar. Tahapan penghitungan harga tunggak dapat diikuti pada Tabel 1.

Tabel 1 (*Table 1*). Metode penghitungan harga tunggak *(Method for calculating stumpage value)*

Step	Harga Tunggak	
	Data	Proses
Volume Produksi	Riap tanaman (m^3 per ha)	Given
	Daur tanaman (th)	Given
	Volume Produksi (m^3 per ha)	Riap per ha * Daur
Compounding Biaya	Biaya Tahunan (Rp per ha)	Given
	Biaya Penanaman (Rp per ha)	Given
	Suku bunga (%)	Given
	Compounding Biaya Tahunan (Rp per ha)	((1 + bunga)^daur – 1) / bunga
	Compounding Biaya Penanaman (Rp per ha)	(1 + bunga)^daur
	Harga Tunggak per ha (Rp per ha)	Comp Biaya Penanaman + Comp Biaya Tahunan

Tabel 1 (*Table 1*). Lanjuran (*Continued*)

Step	Harga Tunggak	
	Data	Proses
Harga Tunggak	Harga Tunggak per m^3 (Rp per m^3)	Harga Tunggak per ha / Vol Produksi per ha
	Profit (%)	Given
	Risk (%)	Given
	Harga Tunggak setelah profit (Rp per m^3)	Harga Tunggak per m^3 + (profit * Harga Tunggak per m^3)
	Harga tunggak setelah profit+risk (Rp per m^3)	Harga Tunggak per m^3 +((profit+risk) * Harga Tunggak per m^3)

3. Harga sosial / harga paritas

Harga sosial adalah harga yang menghasilkan alokasi terbaik dari sumberdaya, dan dengan sendirinya menghasilkan keuntungan tertinggi. Harga sosial dihitung dengan basis opportunity cost yaitu alternatif yang paling menguntungkan dari produk kayu HTR, dan dapat didekati dengan harga paritas. Harga sosial kayu HTR diderivasi dari harga di pasar internasional, dimana harga sosial pada pasar pedagang besar/pabrik pengolahan terdekat dengan pintu petani sama dengan harga internasional setelah disesuaikan dengan nilai tukar serta biaya pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dalam negeri. Tahapan dan penentuan harga ekspor paritas dapat diikuti pada Tabel 2.

Tabel 2 (*Table* 2). Metode penghitungan harga ekspor paritas *(Method for calculating parity price)*

Step	Harga Ekspor Paritas	
	Data	Proses
Harga Internasional	C.i.f. price at point of import	Given
	Freight to point of export	Given
	Insurance	Given
	F.o.b. at point of export	C.i.f * Freigt * Insurance
Currency Conversions	Foreign exchange rate	Given
	Foreign exchange premium	Given
	Equilibrium exchange rate	ER * (1 + ERP)
	F.o.b. in domestic currency	EER * F.o.b. at point of export
Weight Conversions	Weight conversions factor	Given
	F.o.b. in domestic currency and weight	F.o.b . in dom cur/ Weight con fac
Distribution between port & wholesale market	Local transport & marketing costs to wholesale market in social price	Given
	Value before processing	F.o.b in dom. curr. and weight * distrb. costs

Tabel 2 (*Table 2*). Lanjuran (*Continued*)

Step	Harga Ekspor Paritas	
	Data	Proses
	Processing conv. faktor Export parity value at wholesale market	Given Value before processing * conversions factor
Distribution between wholesale & farm gate	Transport, marketing, processing & storage costs to farm in social prices	Given
RESULT	Export parity value at farm gate	Export parity value at wholesale market +/- distr.costs to farm gate (deduct if output ; add if input)

Sumber (*Source*) : Policy Analysis Matrix Manual, Agricultural Policy Analysis Research and Training Program, Food Research Institute, Standford University, USA, 1997.

B. Lokasi Kajian

Kajian dilakukan dengan cara telaah referensi terkait serta tinjauan lapangan. Pengumpulan data lapangan dilakukan di Propinsi Jambi dan Riau dengan pertimbangan di propinsi tersebut telah ada pemanenan kayu HTR yang dibangun melalui pola kemitraan. Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) dibangun di lahan rakyat oleh perusahaan mitra yang memiliki usaha Hutan Tanaman Industri (HTI) dan pabrik pengolahan pulp. Di Propinsi Jambi juga terdapat pabrik kayu lapis yang mengolah kayu karet hasil peremajaan kebun karet rakyat, kayu manis dari kebun rakyat, serta kayu sengon.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kayu *Acacia mangium* Rakyat

Dalam membangun tanaman HTR, lahan harus disiapkan agar layak untuk ditanami, karenanya dilengkapi sarana prasarana parit dan jalan. Agar air tidak menggenangi tanaman, di tanah kering setidaknya diperlukan parit tertier lebar 1,5 s/d 2 m. Namun di tanah gambut diperlukan parit tertier lebar 1,5 s/d 2 m, parit sekunder lebar 6 s/d 8 m, parit primer lebar 12 m, serta outlet ke sungai terdekat.

Demikian pula sarana jalan sangat diperlukan untuk pengangkutan bibit, pupuk, tenaga kerja, hasil kayu, dan pengamanan tanaman. Diperlukan jalan blok dan jalan cabang agar seluruh areal dapat diakses. Pekerjaan penyiapan lahan, pembuatan kanal, pembuatan jalan dapat dilakukan secara mekanis menggunakan eskavator. Rata-rata biaya pemanfaatan lahan gambut lebih tinggi daripada lahan kering.

Pemilihan jenis tanaman *Acacia mangium* mempertimbangkan jaminan kepastian pasar hasil kayunya karena *Acacia mangium* merupakan bahan baku pabrik pulp milik group perusahaan mitra, serta dipandang sesuai dengan budaya *tanam-tinggal* dari masyarakat setempat. Jarak tanam kayu 3 x 2,5 m sehingga terdapat 1.333 pohon/ha, tanpa penjarangan. Tanaman *Acacia mangium* yang telah dipanen memiliki daur 6 sampai 7 tahun.

Pemanenan kayu dilakukan secara mekanik dan manual. Penebangan kayu manual dilakukan oleh tenaga kerja lokal menggunakan *chainsaw*. Setelah dipotong menjadi sortimen kayu bulat kemudian ditarik dan ditumpuk secara berjajar di sisi jalan dalam areal tebang. Mengeluarkan kayu menuju Tempat Penumpukan Kayu (TPK) dapat dilakukan secara mekanik, yaitu ditarik menggunakan eskavator. Dari TPK, kayu diangkut menggunakan truk menuju pabrik pulp. Pemanenan dan pengangkutan kayu sampai ke pabrik pengolahannya umumnya dilakukan oleh pihak ketiga (*out sourching*). Kontraktor pemanenan dan pengangkutan kayu sampai ke pabrik dapat dilakukan oleh Koperasi Petani HTR, atau badan usaha milik petani HTR. Makin jauh jarak lahan pemanenan ke pabrik pengolahan pulp biaya transpor kayu makin mahal, dan sebaliknya.

B. Kayu Karet Rakyat

Dahulu kayu karet hasil peremajaan umumnya hanya dijadikan kayu bakar, namun kini dijadikan bahan baku *veneer core* kayu lapis. Bahkan kayu karet rakyat hasil peremajaan kini telah menjadi andalan utama bahan baku pabrik kayu lapis. Potensi kayu karet rakyat cukup tinggi, namun pabrik kayu lapis tidak memiliki kewenangan untuk menjadwalkan penebangan, sepenuhnya tergantung pada petani karet.

Untuk mendukung kesinambungan pasokan bahan bakunya, pabrik kayu lapis membentuk *Depo Log Supply* di setiap Kabupaten yang bertugas mencari kayu dari lahan rakyat. Depo merupakan ujung tombak pabrik kayu lapis yang bertanggung jawab menjamin kesinambungan pasokan bahan baku pabrik. Setiap Depo memiliki target volume kayu yang harus dipasok ke pabrik, karenanya Depo memiliki keleluasaan untuk memberikan pelayan terbaik pada petani karet. Depo bekerjasama dengan Kepala Desa atau Ketua Adat. Melalui Depo, pabrik kayu lapis menyediakan insentif bagi petani karet, berupa penyediaan modal untuk menebang dan menanami kembali (meremajakan) kebun karetnya.

Kegiatan penebangan kayu karet dilakukan oleh pemilik kebun. Setelah ditebang, kayu dipotong ukuran panjang 1,3 m (4 feet) dan 2,6 m (8 feet) kemudian ditumpuk dipinggir kebun. Depo akan membayar kayu secara tunai di tempat penebangan, langsung setelah kegiatan penebangan selesai. Dalam harga tersebut terkandung biaya tebang (*chainsaw*), biaya potong, biaya lansir ke tempak penumpukan kayu (TPK) atau *loading point*, dan biaya muat ke truk. Pengangkutan kayu sampai ke pintu pabrik juga dilakukan oleh pemilik kebun.

C. Harga Pasar

Di Propinsi Jambi, harga kayu karet rakyat di tempat penebangan berkisar Rp 220.000 s/d Rp 250.000 per m^3. Di Propinsi Riau, harga kayu akasia di tingkat petani berkisar Rp 132.000 s/d Rp 148.000/ton.

D. Harga Tunggak

1. Harga tunggak kayu *Acacia mangium* di Propinsi Jambi sekitar Rp 208.073,84 s/d 226.471,10 per ton, dengan penghitungan sebagai berikut.

Tabel 3 (*Table 3*). Perhitungan harga tunggak kayu *Acacia mangium* di Propinsi Jambi *(Stumpage price for* Acacia mangium *in the Jambi province)*

No	Harga tunggak (Rp)	
	Komponen biaya	Data (Rp)
1	Biaya produksi (Rp)	11.953.600,00
	Daur (th)	6
	Bunga (%)	8 - 10
2	Nilai Tegakan/Ha (Rp)	18.968.860,91 - 21.176.531,57
	Produksi (ton/ha)	150,00
3	Nilai Tegakan/Ton (Rp)	126.459,07 - 141.176,88
	Profit (%)	15
	Resiko (%)	10
4	Nilai Tegakan setelah Profit/Ton (Rp)	145.427,93 - 162.353,41
5	Nilai Tegakan setelah Profit + Risiko/Ton (Rp)	158.073,84 - 176.471,10
	Fee ke pemilik lahan (Rp)	50.000,00
	Nilai Tegakan setelah Profit+Risiko+Fee/Ton (Rp)	**208.073,84 - 226.471,10**

2. Harga tunggak kayu *Acacia mangium* di Propinsi Riau sekitar Rp 106.218,76 s/d Rp 118.580,91 per ton, dengan penghitungan sebagai berikut.

Tabel 4 (*Table 4*). Perhitungan harga tunggak kayu *Acacia mangium* di Propinsi Riau *(Stumpage price for* Acacia mangium *in the Riau Province)*

No	Harga tunggak (Rp)	
	Komponen biaya	Data (Rp)
1	Biaya produksi (Rp)	8.032.300,00
	Daur (th)	6
	Bunga (%)	8 - 10
2	Nilai Tegakan/Ha (Rp)	12.746.250,62 - 14.229.709,42
	Produksi (ton/ha)	150,00
3	Nilai Tegakan/Ton (Rp)	84.975,00 - 94.864,73
	Profit (%)	15
	Resiko (%)	10
4	Nilai Tegakan setelah Profit/Ton (Rp)	97.721,25 - 109.094,44
	Nilai Tegakan setelah Profit + Risiko/Ton (Rp)	**106.218,76 - 118.580,91**

E. Harga Sosial/Paritas

Kayu rakyat dijual ke pabrik yang akan mengolahnya lebih lanjut menjadi komoditas ekspor, sehingga harga sosial dihitung berdasar harga jual di pintu pabrik pengolahannya.

1. Harga sosial kayu karet rakyat di Propinsi Jambi adalah Rp 245.000 s/d 270.000 per m^3, dengan penghitungan sebagai berikut.

Tabel 5 (*Table 5*). Perhitungan harga sosial/paritas kayu karet rakyat di Propinsi Jambi *(Parity price for rubber wood planted by people in the Jambi Province)*

Step	Harga Paritas	
	Komponen biaya	Data
Harga di pintu pabrik	Harga di pintu pabrik kayu lapis per m^3	Rp 500.000 s/d 550.000
Distribusi antara pintu pabrik dan petani	Biaya angkut per m^3	Rp 200.000 s/d 250.000
	Biaya dokumen per m^3 (fee Kades atas pengesahan SKT)	Rp 5.000 s/d 10.000
	Biaya retribusi per m^3 (PAD)	Rp 5.000 s/d 15.000
	Biaya entertain per m^3	Rp 20.000 s/d 30.000
Hasil	**Harga paritas di pintu petani per m^3**	**Rp 270.000 s/d 245.000**

2. Harga sosial kayu *Acacia mangium* di Propinsi Riau adalah Rp 150.500 per ton, dengan penghitungan sebagai berikut.

Tabel 6 (*Table 6*). Perhitungan harga sosial/paritas kayu *Acacia mangium* di Propinsi Riau *(Parity price for* Acacia mangium *in the Riau Province)*

Step	Harga Paritas	
	Komponen biaya	Data
Harga di pintu pabrik	Harga di pintu pabrik pulp per ton	Rp 300.000
Distribusi antara pintu pabrik dan petani	Biaya tebang, potong, angkut ke TPN per ton	Rp 92.000
	Biaya transpor petani-pabrik per ton	Rp 56.000
	Biaya dokumen, dll per ton	Rp 1.500
Hasil	**Harga paritas di pintu petani per ton**	**Rp 150.500**

F. Harga Dasar Penjualan Kayu HTR

Hasil perhitungan harga **di pintu petani** adalah sebagai berikut.

Tabel 7 (*Table 7*). Perhitungan harga dasar penjualan kayu di pintu petani *(Floor price of wood at farm gate)*

No	Harga	Jambi (Rp)	Riau (Rp)	Keterangan
1	Tunggak	208.074 s/d 226.471	106.219 s/d 118.581	per ton
2	Pasar	220.000 s/d 250.000	132.000 s/d Rp 148.000	per ton
3	Sosial	245.000 s/d 270.000	150.500	per m^3

Keterangan: 1 m^3 bbs setara dengan 1,052 ton (wawancara dengan staf Dishut Jambi)

Tampak bahwa harga pasar/aktual berbeda dari harga sosial/efisiensi, artinya ada divergensi. Hal ini diakibatkan oleh adanya kegagalan pasar atau distorsi kebijakan. Pasar dikatakan gagal bila tidak mampu menciptakan harga kompetitif yang mencerminkan *social opportunity cost* atau alokasi sumberdaya/produk yang efisien. Penyebab kegagalan pasar adalah (1) monopoli atau monopsoni, (2) *negative externalities* atau *positive externalities*, (3) pasar faktor domestik yang tidak sempurna. Kebijakan pemerintah yang distortif yaitu kebijakan yang diterapkan untuk mencapai tujuan yang bersifat non-efisiensi, seperti tujuan pemerataan. Secara teori, kebijakan yang paling efisien dapat dicapai apabila pemerintah mampu membuat kebijakan yang dapat menghapus kegagalan pasar dan mampu mengesampingkan tujuan yang non-efisiensi.

Dalam menyusun kebijakan harga dasar penjualan kayu HTR, ketiga harga tunggak, harga pasar, dan harga sosial merupakan masukan yang sangat bermanfaat.

1. Agar harga jual kayu HTR dapat menutup semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk memproduksi kayu, serta mereka juga dapat memperoleh keuntungan yang wajar dari usahanya, maka harga jual kayu HTR minimal sebesar harga tunggaknya.
2. Petani HTR dapat pula meraih keuntungan maksimal dari usaha HTR nya apabila harga jual kayunya dapat setinggi harga sosialnya.
3. Harga pasar adalah harga yang terjadi di lapangan atau harga aktual. Kini harga pasar berada diantara kedua harga tunggak dan harga sosial.
4. Dengan demikian harga dasar penjualan kayu HTR dapat ditentukan dalam kisaran antara HARGA PASAR s/d HARGA SOSIAL, atau minimal dalam kisaran antara HARGA TUNGGAK s/d HARGA SOSIAL.

IV. KESIMPULAN

Dari uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan tentang kebijakan penetapan harga dasar penjualan kayu HTR dalam rangka pengembangan HTR sebagai berikut :

1. Sesuai PP Nomor 6 Tahun 2007, Menteri Kehutanan diamanatkan untuk menetapkan harga dasar penjualan kayu HTR untuk melindungi hak-hak petani HTR.
2. Disisi lain, dalam kondisi pasar oligopsoni (*buyer* terbatas dan *suplier* banyak sehingga harga ditentukan oleh *buyer*) seperti produsen kayu akasia untuk bahan baku pulp di luar Pulau Jawa, kiranya perlu adanya keberpihakan Pemerintah kepada Petani HTR.
3. Dari kajian terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan penghasilan petani HTR, antara lain adalah peningkatan harga jual kayu log, produktifitas HTR, dan kedekatan dengan pasar/pabrik. Untuk stabilitas harga jual dan menguntungkan petani, maka intervensi pemerintah melalui penetapan harga dasar penjualan kayu HTR dapat dipertimbangkan.
4. Harga dasar penjualan kayu HTR dapat ditentukan dalam kisaran antara HARGA PASAR s/d HARGA SOSIAL, atau minimal dalam kisaran antara HARGA TUNGGAK s/d HARGA SOSIAL.

DAFTAR PUSTAKA

Davis KP. 1966. Forest management regulation and valuation, Edisi 2, McGraw Hill Book Company. New York.

Person, S dan E. Monke. 1997. Policy analysis matrix manual, agricultural policy analysis research and training program, Food Research Institute. Standford University. California. USA

Person, S., C. Gotsch dan S. Bahri. 2005. *Aplikasi Policy Analysis Matrix Pada Pertanian Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Santoso, Harry. 2007. Dukungan penelitian dan Ppngembangan hutan tanaman dalam menunjang pembangunan hutan tanaman rakyat. Seminar sehari forum komunikasi Kelitbangan, Badan Litbang Kehutanan Departemen Kehutanan. Jakarta.

Sven Petrini. 1953. Element of Forest Economics. Tweeddole court. London.